



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 521 –Bapenda/2024

TENTANG

PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bupati sesuai dengan kewenangannya tidak memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/1276/Sj hal Implementasi Pengenaan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit;

2. Surat Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I Nomor: HQ-DIRUT/X/2024.05.08-3 tanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara I;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Proyek Strategis Nasional.
KEDUA : Pengenaan Tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada aset PT Perkebunan Nusantara I pada Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal dikemudian hari diketahui ketidaksesuaian data dan informasi atas peralihan hak Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka PT Perkebunan Nusantara I wajib membayar seluruh kekurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 521 –Bapenda/2024
TENTANG
PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PROYEK
STRATEGIS NASIONAL

RINCIAN DAFTAR ASET MILIK PT PERKEBUNAN NUSANTARA I YANG KENAKAN TARIF 0% (NOL PERSEN)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A.Bidang Sertifikat Hak Yang Masih Berlaku

No.	Kebun Usaha/Pabrik	Lokasi		Luas (Ha)	SK Hak NO.	Tanggal SK Hak	No.HGU/HGB/ HP/HPL
		Provinsi	Kabupaten				
PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERSEROAN PERKEBUNAN VIII							
1.	Panglejar/Rama	Jawa Barat	Bandung Barat	587,5847	1/HGU/KEM-ATR/BPN/2016	13/01/2016	00088
2.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	17,6185	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00014
3.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	170,4478	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00015
4.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	74,3911	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00017
5.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	2,415	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00018
6.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	59,4853	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00010
7.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	175,1493	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00011
8.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	16,891	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00013
9.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	369,3296	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00019
10.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	75,9994	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00020
11.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	252,4383	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00021
12.	Ciater/Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	330,86	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00021
13.	Ciater/Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	43,51	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00022
14.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	10,1716	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00023
15.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	191,4898	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00005
16.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	115,2917	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00006
17.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	1,3994	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00007

No.	Kebun Usaha/Pabrik	Lokasi		Luas (Ha)	SK Hak NO.	Tanggal SK Hak	No.HGU/HGB/ HP/HPL
		Provinsi	Kabupaten				
18.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	0,5893	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00008
19.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	1,1029	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00009
20.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	99,3215	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00012
21.	Panglejar	Jawa Barat	Bandung Barat	224,4318	113/HPL/KEM-ATR/BPN/2017	14/12/2017	00016
JUMLAH				2.819,918			

B. Bidang Tanah Belum Memiliki Sertifikat Hak

No	Kebun Usaha/Pabrik	Lokasi		Luas (Ha)	Dokumen Perolehan Tanah	Tanggal Dokumen	Instansi yang Menyerahkan/Memberikan
		Provinsi	Kabupaten				
PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERSEROAN PERKEBUNAN VIII							
1.	Ciater/ Bukittunggul	Jawa Barat	Bandung Barat	250,26	14/HGU/BPN/2005	18/02/2005	Kementrian ATR/BPN
2.	Ciater/ Pangheotan	Jawa Barat	Bandung Barat	731,835	14/HGU/BPN/2005	18/02/2005	Kementrian ATR/BPN
3.	Montaya	Jawa Barat	Bandung Barat	2.133,72	14/HGU/BPN/2005	18/02/2005	Kementrian ATR/BPN
JUMLAH				3.115,815			

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR